

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Cenderawasih No. 233 B Makassar (90222)

Telp. (0411) 870708 – 877021 Fax. (0411) 876223

Makassar, Februari 2019

Kata Pengantar

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui sidang Paripurna DPRD Prov. Sul Sel pada Bulan Maret Tahun 2018 mendatang, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 120/213/B.Pemda tentang Permintaan Bahan/Data Penyusunan LKPJ/LPPD Gubernur Sul Sel Tahun Anggaran 2018 untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018, maka materi LPPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sul Sel terdiri atas urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pelayanan aparatur kelembagaan kediklatan yang didasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta sesuai dengan capaian kinerja dan target-target yang telah tercantum dalam Renstra Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Dengan tersusunnya Laporan ini, maka diharapkan tersedia bahan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewajiban konstitusional Gubernur selaku Kepala Daerah sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Makassar, Februari 2019

KEPALA BADAN,

Ir. H.IMRAN JAUSI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641126 198901 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. DASAR HUKUM	1
III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3
A. PROGRAM DAN KEGIATAN	3
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	4
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sisten Evaluasi Kinerja	5
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	6
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6
B. REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN	8
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	10
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sisten Evaluasi Kinerja	18
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	21
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	24
C. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB	26
D. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	30
E. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	34
F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	35
G. KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI	50
H. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	55
IV. PENUTUP	30
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

“URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN”

A. GAMBARAN UMUM

Kebijakan peningkatan kualitas profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan pada dasarnya selalu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan Tahun 2028.

Kondisi ini menghendaki adanya upaya dari berbagai tatanan yang ada untuk mewujudkannya, olehnya itu tatanan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan Visi RPJMD Sulsel 2013-2018 yaitu : *“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”*. Untuk mewujudkan Visi ini, maka seluruh unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menjabarkannya kedalam program kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang bersangkutan.

Menyikapi hal tersebut, kedudukan dan peranan lembaga kediklatan perlu semakin diperkuat dan ditingkatkan. Disini diperlukan realokasi kewenangan secara jelas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang sejalan dengan nuansa, semangat dan filosofi yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari maksud ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Terdapat 5 (Lima) Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun Renstra (2013-2018), maka pada Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kediklatan, pengembangan dan pembinaan personil, penatausahaan administrasi kantor, barang, keuangan, penyediaan dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran penyediaan sistem informasi manajemen kediklatan, kepegawaian dan keuangan serta pengelolaan multimedia pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga diklat yang terakreditasi sehingga dapat diwujudkan profesionalisme dan kemandirian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengelola kediklatan sesuai standar yang dipersyaratkan, dan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja serta kesejahteraan pegawai Badan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini terdiri dari :

- 1) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kediklatan serta pemeliharannya sarana dan prasarana kediklatan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga diklat terakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola kediklatan yang profesional dan mandiri. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
6. Pemeliharaan Gedung Kampus II

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 melalui peningkatan dan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini terdiri dari :

1. Peningkatan perencanaan program kerja badan
2. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan
3. Penyusunan keuangan badan
4. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
5. Penyusunan laporan kinerja badan
6. Penyusunan LKj dan LPPD badan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyusunan kegiatan program ini dilaksanakan dengan mengacu pada kesesuaian antara jenis program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintahan serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu program ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada tingkat organisasi pemerintahan di Provinsi sampai di Desa/Kelurahan sesuai amanat PP Nomor 79 Tahun 2005. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa rumpun diklat yaitu diklat teknis, diklat fungsional, Diklat Pemerintahan, diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader. Adapun rumpun dan jenis diklat akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan rumpun diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dan diklat kader

- 2) Pelaksanaan rumpun diklat fungsional
- 3) Pelaksanaan pelatihan/workshop/kursus-kursus singkat
- 4) Pendampingan dan Penjaminan Mutu penyelenggaraan Diklat kepemimpinan, Diklat Prajabatan, dan Diklat Kader
- 5) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan Gol III, II
- 6) Pendampingan penyelenggaraan rumpun diklat teknis dan fungsional provinsi dan kab./Kota se SulSel
- 7) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis dan fungsional provinsi dan kab./kota se sulsel
- 8) Pelaksanaan rumpun diklat teknis
- 9) Pelaksanaan diklat pemerintahan
- 10) Penyelenggaraan rumpun diklat teknis, fungsional dan diklat pemerintahan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan program ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen kediklatan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan latihan sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan di bidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/ kota karena keterbatasan sumber daya, akan menjadi kewenangan provinsi (sebagai fungsi fasilitasi) disamping kewenangan untuk melaksanakan diklat tertentu utamanya diklat yang sifatnya baru dan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan.

Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (*training delivery*) ke pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan (*training development*). Orientasi ke arah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan mengembangkan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta disain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/lokal, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat (*training need analisis*) dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur yang relevan dengan bidang

tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM ataupun komponen masyarakat lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program kediklatan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi/dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan sistem pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentatif. Sementara itu untuk menciptakan tolak ukur yang sama sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan program-program kediklatan, maka diperlukan upaya-upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi kediklatan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap dapat terjaga sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis dilapangan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini terdiri dari:

1. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan
2. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
3. Kemitraan dan pengembangan kediklatan
4. Promosi dan publikasi kediklatan
5. Assessment Center dan Psikologi Terapan
6. Pengelolaan media intruksional pembelajaran diklat

B. REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan Anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 1.997.048.820,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.957.401.961,- dengan tingkat capaian kinerja

input (dana) 98.01%, sedangkan tingkat capaian kinerja output 99,74% dan outcome 100%, untuk pelaksanaan 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.950.112.900,- dan realisasi sebesar Rp.912.438.210,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 96,03% sedangkan capaian kinerja output sebesar 99,80%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan jasa telepon, air, listrik, surat kabar, majalah faximile dan internet. dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.502.156.000,- dan realisasi sebesar Rp.501.709.700,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99.91% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan peralatan kebersihan dan pembersih dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.30.677.600,- dan realisasi sebesar Rp.30.638.600,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99.87% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan belanja alat tulis kantor (ATK) dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.12.450.000,- dan realisasi sebesar Rp.12.445.000,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99.96% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan belanja alat tulis kantor (ATK) dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

5) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.69.961.000,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,94% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan belanja cetak dan penggandaan) dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.358.837.920,- dan realisasi sebesar Rp.357.434.151,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,61% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung kelancaran perjalanan dinas kedalam daerah dan keluar daerah. dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.72.814.400,- dan realisasi sebesar Rp.72.775.300,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,95% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai) kering serta belanja pemeliharaan jaringan listrik. dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 4.308.099.300,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.294.240.760,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 99,68%, sedangkan tingkat capaian kinerja output 100% untuk pelaksanaan 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 343.920.800,- dan realisasi sebesar Rp.343.890.000,- sehingga tingkat capaian

input (dana) sebesar 99.99% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk kompetensi pegawai Badan dalam menunjang pelaksanaan tupoksinya melalui pengikutsertaan dalam kursus/pelatihan/sosialisasi/bintek dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja outcome 100% dengan tingkat capaian tercapainya tingkat kompetensi PNS badan sesuai tugas-tugasnya.

2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 87.327.000,- dan realisasi sebesar Rp.85.151.000,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 97.51% sedangkan capaian kinerja output sebesar 99,12%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk pengelolaan administrasi kepegawaian Badan yang optimal dalam mewujudkan kenaikan pangkat dan KGB serta pensiun pegawai Badan yang tepat waktu, serta tersedianya buku induk, Bezetting dan DUK Pegawai Badan dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja outcome 100% dengan tingkat capaian tersedianya informasi dalam rangka pembinaan karier pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3) Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 1.325.955.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.325.950.500,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 100% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung tersedianya penilaian angka kredit Widyaiswara dan penilaian prestasi kerja Pegawai Badan dengan tingkat capaian outcome 100% dengan tingkat capaian terciptanya budaya disiplin kerja di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 1.302.416.450,- dan realisasi sebesar Rp.1.301.749.250,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 99,95%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk penyediaan sarana peralatan/peralatan dan asrama dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan capaian tersedianya pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor,

pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan komputer, pengadaan mebeulair, pengadaan peralatan dapur, pengadaan penghias ruangan rumah tangga, pengadaan alat-alat studio, pengadaan alat-alat komunikasi, pengadaan alat-alat laboratorium, pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Adapun perincian sarana/peralatan gedung kantor dan asrama sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin yakni :

- ✓ Lemari arsip Informa
- ✓ Printer/Epson
- ✓ Printer /Pixma G1000
- ✓ Dispenser
- ✓ CCTV
- ✓ Meja Kerja 1 Biro
- ✓ Meja Kerja ½ Biro
- ✓ Meja TV
- ✓ Mesin Pompa
- ✓ Tempat tidur springbed
- ✓ Mesin Ketik
- ✓ Peralatan dapur
- ✓ Lemari badrop
- ✓ Lemari Kitchen set
- ✓ Lemari Pakaian 2 pintu
- ✓ Kursi home teather
- ✓ Komputer Notebook (laptop)
- ✓ Printer Epson
- ✓ Printer Canon
- ✓ Sprei
- ✓ Komputer Server
- ✓ Lemari Besi

b. Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor dan bangunan

- ✓ Renovasi kamar asrama putri Lt. 1 (kampus 2) 1 paket
- ✓ Pekerjaan partisi asrama putra garuda 2 1 paket
- ✓ Renovasi dinding tembok pagar kampus 2 1 paket

- ✓ Pekerjaan Pembuatan Pos Jaga Kampus II (Bagian Belakang Gedung) (ukuran Panjang 4 m x Lebar 3 m) 1 paket
- ✓ Pekerjaan Renovasi Kamar Asrama Putri Kampus II 1 paket
- ✓ Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Asrama/Aula/Home teatre Kampus I 1 paket
- ✓ Pekerjaan Partisi Ruang Kerja Bidang-Bidang 1 paket
- ✓ Pekerjaan Pembuatan Ruang Arsip Badan Kampus II 1 paket
- ✓ Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Ruangan Kepala Badan 1 paket

5) Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.227.951.192,- dan realisasi sebesar Rp.222.770.860,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 97.73%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 99.65% Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk optimalnya penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai peruntukan dalam tahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan capaian berfungsinya sarana prasarana kantor dan asrama sesuai dengan peruntukannya. Adapun sarana dan prasarana yang diperbaiki dalam Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- Pek. Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Asrama/Aula/Home Teatre Kampus I
- Pekerjaan Pemeliharaan Lift
- Biaya Perbaikan AC Kantor dan Asrama (Kampus I) Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pemeliharaan Mesin Genset (Kampus I)
- Kayu (Kampus I) Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Landscape (Kolam,Tanaman) Kampus I Melalui Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pemeliharaan Air Bersih Gedung dan Asrama (Kampus I) Melalui Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (Kampus I) Melalui Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor Kampus I Melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- pemeliharaan perbaikan lemari pakaian asrama garuda

6) Pemeliharaan Gedung Kampus II

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.574.588.858,- dan realisasi sebesar Rp.574.234.650,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 99,94%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk optimalnya penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai peruntukan dalam tahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan capaian berfungsinya sarana prasarana kantor dan asrama sesuai dengan peruntukannya. Adapun sarana dan prasarana yang diperbaiki dalam Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- ☞ Biaya Perbaikan AC Kantor dan Asrama Kampus II Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ (Kampus II) Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah/Kotor Kampus II Melalui Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ Biaya Pemeliharaan Air Bersih Gedung dan Asrama Kampus II Melalui Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ Biaya Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor Kampus II Melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ☞ pemeliharaan alat komunikasi kampus II
- ☞ Pemeliharaan alat studio LCD Proyektor
- ☞ Pemeliharaan komputer
- ☞ Biaya Pemeliharaan Mesin Fotocopy
- ☞ Biaya Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor Kampus II Melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ☞ Pek. Pemeliharaan Landscape (kolam, tanaman) Kampus II (Perubahan)
- ☞ Pek. Pemeliharaan Ruang Perpustakaan (Perubahan)
- ☞ Pek. Perbaikan dan Pemeliharaan Ruang Widyaiswara Kampus II
- ☞ Pek. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Asrama Kampus II
- ☞ Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Landscape (Kolam,Tanaman) Kampus II

7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.445.940.000,- dan realisasi sebesar Rp.440.494.500,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 98.78%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk optimalnya penggunaan/pemanfaatan kendaraan operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi sesuai peruntukan dalam tahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan capaian berfungsinya sarana prasarana kantor dan asrama sesuai dengan peruntukannya. Adapun kendaraan operasional yang diperbaiki dalam Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- ☞ Biaya reparasi dan penggantian onderdil (7 Mobil)
- ☞ Biaya Pemeliharaan Accu dan Ban (3 Mobil)
- ☞ Biaya reparasi dan penggantian onderdil motor (6 motor)
- ☞ Biaya pemeliharaan Accu dan Ban (6 Motor)

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan anggaran jumlah perubahan APBD sebesar Rp. 888.540.500,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 885.989.550,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) adalah sebesar 99.71%, sedangkan tingkat capaian output sebesar 100% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tersedianya dukungan informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran kegiatan badan serta tersedianya hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan badan tahun 2018.

Adapun penjelasan pelaksanaan kegiatan dalam program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan Program Kerja Badan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 424.841.000,- dan realisasi sebesar Rp. 423.434.300,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,67% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung tersedianya dokumen perencanaan

Tahunan Badan melalui Penyusunan Renja 2018, KUA dan PPAS, RKA dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan tingkat capaian tersedianya dokumen perencanaan tahunan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyusunan Renja, KUA PPAS Perubahan 2018, KUA PPAS Pokok 2018, RKA Perubahan 2018, RKA Pokok 2019 dan DPA

2. Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 245.923.500,- dan realisasi sebesar Rp. 245.335.250,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,76% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas melalui dukungan administrasi dan penatausahaan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tercapainya tertib administrasi keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan tingkat capaian tercapainya tertib administrasi keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 49.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.969.000,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 99,94%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Tersedianya Dukungan Informasi dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Badan.

4. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Diklat

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.136.657.200,- dan realisasi sebesar Rp. 135.832.200,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) 99.61%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Tersedianya informasi hasil pelaksanaan program kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi Tahun 2018.

5. Penyusunan LKj dan LPPD Badan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.32.418.800,- dan realisasi sebesar Rp. 32.418.800,- sehingga tingkat capaian

kinerja input (dana) 100%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tersedianya hasil capaian kerja pelaksanaan program kegiatan badan tahun 2018 melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2018.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 5.801.526.680,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.064.832.340,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) adalah sebesar 87.30% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 99,31% dan outcome sebesar 100%. Adapun Pelaksanaan program ini yang terbagi dalam 10 kegiatan kediklatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.903.680.500,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.646.151.500,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 94.75% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 99,45% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Diklat Kepemimpinan Tk. II sebanyak 1 angkatan/55 orang
2. Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 3 angkatan /120 orang
3. Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 3 angkatan/120 orang
4. Diklat Latsar sebanyak 2 angkatan/76 orang
5. Diklat Revolusi Mental sebanyak 2 angkatan / 60 orang

2) Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD 2018 sebesar Rp. 31.574.000,- dan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 31.574.000,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 100% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 100% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat Fungsional 1 jenis diklat/1

angkatan dengan jumlah alumni 30 orang dari target 30 orang yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Workshop Penghitungan Angka Kredit Untuk Fungsional Tertentu sebanyak 1 angkatan/30 orang
- 3) Pendampingan dan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 191.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.899.000,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) 77,84% dan capaian kinerja output sebesar 93,23% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Terjalannya simpul kerjasama mengenai koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader Provinsi dan Kab/Kota yang sinergis.

- 4) Pendampingan Penyelenggaraan Rumpun Diklat Teknis dan Fungsional Provinsi dan Kab./Kota se Sul Sel

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 60.082.408,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.528.040,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) 95.75% dan capaian kinerja output sebesar 99,89% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Terjalannya simpul kerjasama mengenai koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional dan Kab/Kota yang sinergis.

- 5) Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis

Pada kegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.131.167.500,- dan realisasi penggunaan anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 131.167.500,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 100% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 100% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat teknis 2 jenis diklat dengan jumlah alumni 90 orang yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Workshop Tata Naskah Dinas 1 angkatan /30 orang
2. Workshop Keprotokolan 2 angkatan / 60 orang

6) Pelaksanaan Rumpun Diklat Pemerintahan

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD 2018 sebesar Rp. 49.512.300,- dan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 49.512.300,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 100% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 100% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat teknis 1 jenis diklat dengan jumlah alumni 30 orang dari target 30 orang yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Workshop Penyusunan RPJMDes 1 angkatan / 30 orang

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR.

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 656.236.800,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 632.771.780,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) program sebesar 96.42%, sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 99,85% dan outcome 100% untuk pelaksanaan 7 kegiatan yaitu :

1) Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.248.109.000,- dan realisasi sebesar Rp.247.176.560,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 99,62%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya kualitas penyelenggaraan diklat sesuai standar SMM 9001:2008.

2) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.55.079.000,- dan realisasi sebesar Rp.46.918.100,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 85.18%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 99.25%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan AKD bagi aparat SKPD Prov.SulSel

3) Kemitraan dan pengembangan kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.56.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 56.393.900,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana), output sebesar 99.02%. Sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%

serta tingkat capaian kerja Outcome sebesar 100% dengan capaian Terwujudnya peningkatan jaringan kemitraan dan pengembangan kediklatan.

4) Promosi dan Publikasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.156.055.000,- dan realisasi sebesar Rp. 149.417.000,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 95.75%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 99,84%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya buletin inovasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia prov. Sul sel, serta tercapainya sarana informasi kediklatan yang berkualitas mengenai eksistensi & kapabilitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia prov. Sul Sel baik untuk publik maupun kalangan internal.

5) Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.32.200.500,- dan realisasi sebesar Rp.32.172.920,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 99,91%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Tercapainya hasil monev. Bagi peserta diklat.

6) Pengelolaan Media Instruksional pembelajaran Diklat

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.107.843.300,- dan realisasi sebesar Rp. 100.693.300,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 93,37%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 99.79%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian terwujudnya daya dukung pembelajaran media instruksional pembelajaran diklat

B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana urusan wajib adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

C. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI, PANGKAT, GOLONGAN SERTA JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memiliki PNS sebanyak 109 orang keadaan Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi pegawai menurut pendidikan sebagai berikut : Program Doktoral (S-3) sebanyak 12 orang atau sekitar 11,01%, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 41 orang atau 37,61%, berkualifikasi Sarjana (S-1) sebanyak 41 orang atau 37,61%, bekualifikasi sarjana muda (D-3) sebanyak 7 orang atau sekitar 6,42% serta sebanyak 8 orang atau 7,34% yang berkualifikasi SLTA kebawah.
- 2) Jumlah Pegawai

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki PNS Sebanyak 109 orang keadaan Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Badan Diklat
Menurut Jenis kelamin Tahun 2018

No	Unit Kerja	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat	13	14	27
2	Bid. Dik. Kepemimpinan	9	4	13
3	Bid. Dik. Perencanaan Kediklatan	6	4	10
4	Bid. Dik. Teknis dan Fungsional	3	6	9
5	Bid. Dik. Pengembangan dan Inovasi Kediklatan	6	5	11

Sedangkan mengenai pembinaan dan pemberdayaan PNS yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui pendayagunaan dengan mendistribusikan kedalam bidang-bidang/unit kerja organisasi. Distribusi PNS menurut Bidang dan Sekretariat dapat diuraikan secara kuantitatif baik PNS laki-laki maupun perempuan pada daftar terlampir.

Didalam mendistribusikan PNS tentunya banyak variable yang mempengaruhi yakni persyaratan formal diantaranya kesesuaian kompetensi PNS dengan jabatan yang tersedia, namun secara kenyataannya selama ini sulit dicapai disemua lini pemerintahan karena berbagai normative yang ada tidak saling terkait secara berjenjang sehingga perlu

adanya regulasi secara pasti mengenai jenis dan jenjang kompetensi jabatan yang terkait dengan jenis dan jenjang pendidikan dan diklat yang dipersyaratkan.

Distribusi Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Golongan, jenis kelamin serta Widyaiswara/tenaga pengajar, dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.SulSel
Menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin
Keadaan 31 Desember 2018

No	Menurut Golongan/ Ruang	Unit Kerja																		Jumlah Total
		Kepala Badan		Sekretariat		Bidang Perencanaan		Bidang Pengembangan		Bidang Diklat Kepemim		Bidang Diklat Teknis dan		Fungsional Arsiparis		Fungsional Pustakawan		Widyaiswara /Fungsional		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Gol. I																			1
	a							1												1
	b																			-
	c																			-
	d																			-
2	Gol. II																			-
	a																			-
	b					1						1	1							3
	c			3						1		1								5
	d			1	1															2
3	Gol. III																			-
	a			2	1		1				1			1						6
	b			2	1				1				1					1		6
	c			4	4	1	2	1	2		1	1	2	1	1	1		1		22
	d			1	6	2	1	1	2	2		1	1	2		1		3		23
4	Gol. IV																			-
	a				1	1	2	1			2						1	3	1	12
	b						1	3		1			1			1	5			12
	c	1																7	2	10
	d																2	4		6
	e																			-
JUMLAH		1	-	13	14	5	7	7	5	4	4	4	6	4	1	2	2	22	7	109

Tabel 1.3

**DATA JUMLAH TINGKAT ESELON DAN PEJABAT MENURUT JENIS KELAMIN PADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEADAAN 31 DESEMBER 2018**

No	Jabatan				JUMLAH Job Pegawai																		Jumlah (8+11+ 14+17)	Ket
	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Fungsional Pustakawan			Fungsional Arsiparis			Widyaiswara				
					L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	15	16	17	18	19
	-	1	5	15	1	-	1	2	3	5	9	6	15	2	2	4	4	1	5	22	8	30	60	

Tabel 1.4
DATA JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN TETAP
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN
KEADAAN DESEMBER 2018

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III A B C D		1 1			1 1		Pustakawan Ahli Madya : 2 orang Pustakawan Ahli Utama : 2 orang
2	Golongan IV A B C D E		1	1			1 1	
Jumlah			3	1		2	2	

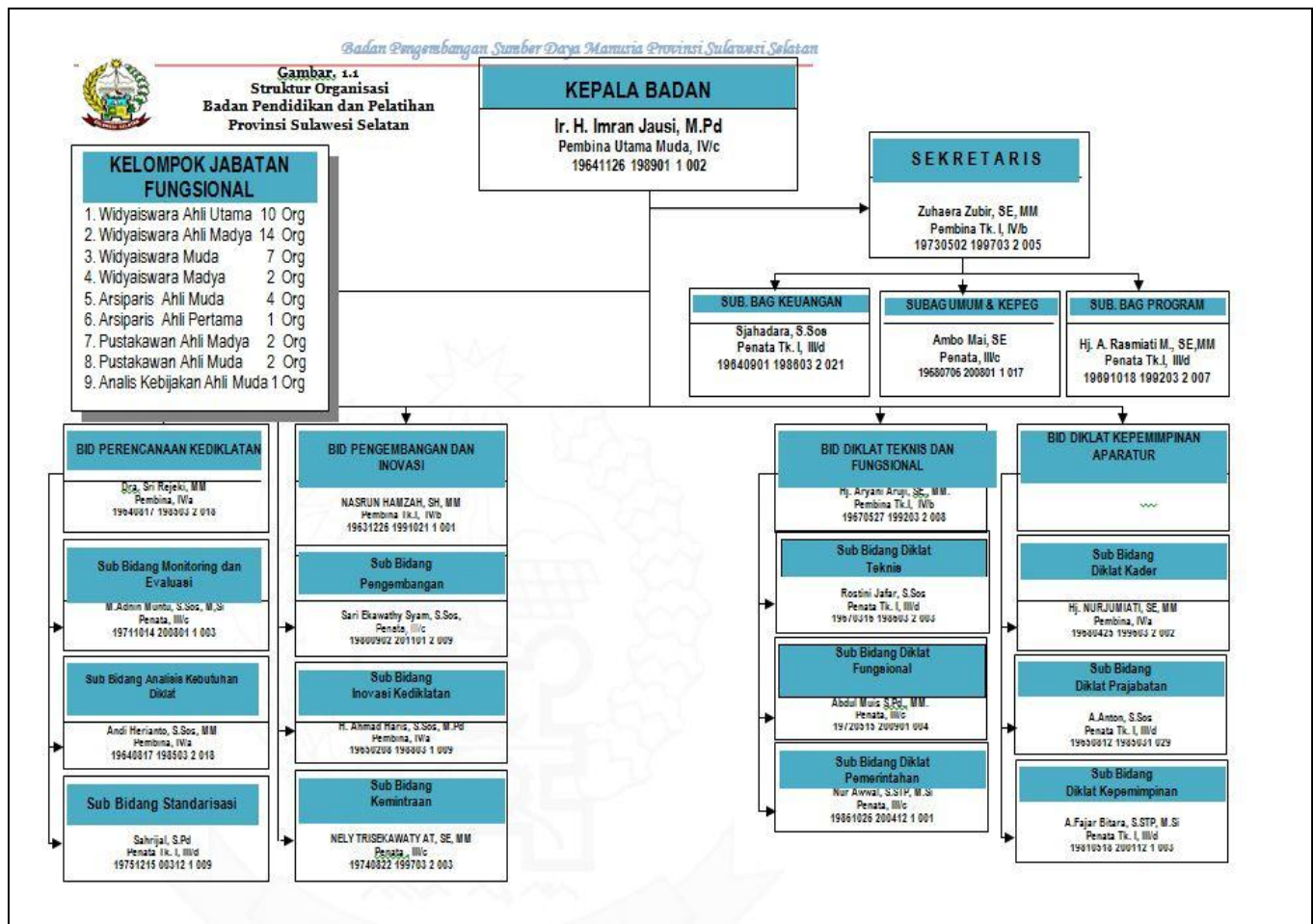
DATA JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL ARSIPARIS TETAP
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN
KEADAAN DESEMBER 2018

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III A B C D		1 2 2			1 1 2	 1	Arsiparis Ahli Muda : 4 Orang Arsiparis Ahli Pertama : 1 Orang
2	Golongan IV A B C D E							
Jumlah			5			4	1	

**DATA JUMLAH TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA TETAP
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN
KEADAAN DESEMBER 2018**

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III A B C D							
				1		1		
				1		1		
			1	3		3	1	Widyaiswara Muda : 9 orang
2	Golongan IV A B C D E							
				4		3	1	Widyaiswara Ahli Madya : 14 orang
				5		5		
				8	1	7	2	
				2	4	2	4	Widyaiswara Ahli Utama : 7 orang
	Jumlah		1	24	5	22	8	

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SDM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018



D. REALISASI ANGGARAN FISIK DAN KEUANGAN

Dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3314 / X / Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.28.213.819.290,- dan realisasi penggunaan anggaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp.27.119.353.147,- atau 96,12%. Realisasi penggunaan Anggaran ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.2562.331.190,- atau 98,09% dari rencana anggaran sebesar 14.284.116.756,- dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp.12.835.236.391,- atau tingkat capaian kinerja input (dana) 94,02% dari rencana anggaran sebesar Rp.13.651.488.100,- dan realisasi fisik 100% .

Tabel 1.5
Anggaran dan Realisasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA. 2018

No	U R A I A N	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen-tase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.562.331.190	14.284.116.756	98,09	278.214.434
1.	Gaji dan Tunjangan	7.811.181.450	7.621.053.910	97,57	190.127.540
2.	Tambahan Penghasilan PNS	6.751.149.740	6.663.062.846	98,70	88.086.894
B.	BELANJA LANGSUNG	13.651.488.100	12.835.236.391	94,02	816.251.709
1	Belanja Barang dan Jasa	12.379.448.900	11.563.798.091	93,41	815.650.809
2	Belanja Modal	1.272.039.200	1.271.438.300	99,95	600.900
JUMLAH ANGGARAN		28.213.819.290	27.119.353.147	96,12	1.094.466.143

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BPSDM, 31 Des. 2018

Belanja langsung terdiri dari 5 (lima) program kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dalam 32 (tiga puluh dua) kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana kinerja tahunan yang ditetapkan sebelumnya dengan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.13.651.488.100,- dan terdapat realisasi penggunaan Anggaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp. Rp.12.835.236.391,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 94,02% dan realisasi fisik sebesar 100% setelah dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka diperoleh capaian kinerja outcome kegiatan dengan kategori **"Sangat Baik"** .

E. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai komitmen Pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kompetensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka harus disikapi dengan perencanaan pembangunan daerah yang berdasar kepada :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- 3) Rencana Strategis OPD (RENSTRA)
- 4) Rencana Kerja OPD (RENJA)

F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

• Kampus I

Dukungan sarana dan prasara kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Ex. Badan Diklat) Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah seluas 6.480 m² dengan sertifikat Nomor 55 tanggal 28 September 1987 milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bangunan diatas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Perpustakaan, Kantin, Ruang Studio, Dapur, Fasilitas Olahraga, Ruang Fitness, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan pada gedung C Lantai II memiliki kamar 12 buah dengan kapasitas perkamar sebanyak 3 orang dan Lantai III memiliki kamar sebanyak 9 kamar dengan kapasitas 4 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 72 kamar dan asrama yang dipersiapkan pada gedung D Lantai I, II, III, IV dan V memiliki 32 kamar dengan kapasitas 2 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 64 orang. Sedangkan ruang belajar pada gedung C sebanyak 3 ruangan dengan kapasitas 40 orang per ruangan, Aula pada gedung B Lt. II sebanyak 1 ruangan dengan kapasitas 350 orang dan Aula gedung D Lt. I dengan kapasitas 60 orang. Kemudian terdapat ruang diskusi / rapat sebanyak 3 unit masing-masing pada gedung A Lt. III sebanyak 2 ruangan, gedung A Lt. I sebanyak 1 ruangan dengan daya tampung masing-masing 20 orang dan 1 ruangan rapat pimpinan pada gedung A Lt. I selain itu terdapat pula ruangan kantin/makan pada gedung B Lt. I dan gedung E Lt. I kantin Dharma Wanita dan ruang koperasi.

• Kampus II

Dukungan sarana dan prasarana perkantoran kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Sulawesi Selatan yang menjadi bangunan yang menjadi milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kampus II Ex. IPDN secara keseluruhan adalah seluas 7.414 m² sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1679/VIII/Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014

tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan diatas tanah tersebut yaitu Bangunan Kantor, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Kantin, Ruang Fitness, Dapur, Fasilitas Olahraga, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan memiliki kamar 24 buah dengan rincian Asrama garuda (Putra) Lantai I sebanyak 2 barak dengan kapasitas tempat tidur masing-masing sebanyak 10 buah dan Lantai II sebanyak 2 barak kamar dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 10 buah sehingga daya tampung untuk Asrama Putra sebanyak 40 orang sedangkan Asrama Putri pada Lantai I terdapat 1 barak dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 11 orang dan Lantai II terdapat 1 barak dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 14 orang sehingga daya tampung untuk Asrama Putri sebanyak 25 orang. Asrama untuk paviliun terbagi atas 4 unit masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 5 buah sehingga daya tampung untuk paviliun sebanyak 20 orang.

Sedangkan ruang belajar terdiri dari Ruang Belajar dengan kapasitas 40 orang per ruangan, Ruang Rehat untuk pengajar dan peserta 1 unit, Aula Utama sebanyak 1 unit dengan daya tampung kurang lebih 300 orang, ruangan belajar/kelas untuk peserta diklat sebanyak 3 unit, ruang diskusi/seminar sebanyak 3 unit, laboratorium Bahasa 1 unit dengan kapasitas 30 orang, ruang makan sebanyak 2 unit, mesjid, ruang binatu/laundry, ruang tamu pimpinan, fasilitas olahraga, ruang karaoke, Apotik/Klinik (Fisioterapy dan Radiology), kantin/warkop, fasilitas perbankan yakni Bank SulSelbar, ATM Bank BNI, ATM Bank Mandiri masing-masing 1 unit.

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibandingkan dengan kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Identifikasi permasalahan kediklatan tidak terlepas dari konsep Pendidikan dan Pelatihan (Human Resources Development/ HRD) di Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilihat dari berbagai aspek kediklatan, maka permasalahan yang sedang dan mungkin kita hadapi dengan diberlakukannya desentralisasi kediklatan adalah sebagai berikut :

1) Masalah-masalah yang dihadapi

- a) Terbatasnya regulasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengembangan SDM
- b) Adanya lembaga kediklatan regional / kementerian / Lembaga di daerah
- c) Rendahnya anggaran terhadap kebutuhan penyelenggaraan diklat.
- d) Terbatasnya tenaga fungsional Widyaiswara untuk pendidikan dan pelatihan teknis

2) Pemecahannya

- a) Perlunya regulasi untuk penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pengembangan SDM
- b) Pelaksanaan akreditasi diklat oleh LAN RI
- c) Perlunya peningkatan anggaran terhadap penyelenggaraan kediklatan yang lebih luas dan spesifik
- d) Peningkatan penyediaan tenaga fungsional Widyaiswara khususnya untuk pendidikan dan pelatihan teknis.

H. KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang menggembirakan diantaranya adalah :

- Sertifikat Penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai peserta dalam acara Pameran Pembangunan Sul-Sel EXPO Tahun 2018 Gubernur Sulawesi Selatan (Makassar, 12 Agustus 2018).

I. PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dibuat sebagai hasil pelaksanaan program kegiatan urusan Wajib Desentralisasi Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi dan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian yang merupakan Akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 untuk menjadi bahan penyusunan LPPD Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018.

Makassar, Februari 2019

KEPALA BADAN,

Ir.H. IMRAN JAUSI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641126 198901 1 002